BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya “keselamatan konstruksi”, yaitu pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan (Permen PUPR No 10/PRT/M Tahun 2021 tentang pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)).

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) merupakan bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Keselamatan konstruksi diartikan segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan 12 standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja keselamatan publik, harta benda, material, peralatan, konstruksi dan lingkungan. SMKK ini mengadopsi ISO 45001:2018 dengan beberapa penyesuaian, khususnya di sektor jasa konstruksi Indonesia pasca-terbitnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sesuai Permen PUPR No.10 Tahun 2021 terdiri dari 6 bab, yaitu:

1. Umum
2. Standar K4
 - a) Umum
 - b) Rancangan Konseptual SMKK
 - c) Elemen SMKK
 - d) Penerapan SMKK
 - e) Unit Keselamatan Konstruksi
 - f) Risiko Keselamatan Konstruksi
3. Biaya Penerapan SMKK
4. Pembinaan dan Pengawasan
5. Peralihan
6. Penutup.

Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan Keselamatan Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No.10 tahun 2021 diantaranya :

a. Tahap Pengkajian dan Perencanaan.

Di tahap ini, pengguna perlu menyusun Rancangan Konseptual SMKK. Pengguna dapat meminta bantuan Konsultan Pengkajian dan Konsultan Perencanaan. Isi dari Rancangan Konseptual SMKK berupa data umum proyek, dan identifikasi keselamatan konstruksi mulai dari aspek, deskripsi awal dan rekomendasi teknis.

b. Tahap Perancangan.

Dalam Tahap Perancangan sudah muncul Detailed Engineering Design (DED) dan estimasi harganya. Disini harus disusun dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) perancangan yang tentunya lebih detil dari rancangan konseptual SMKK. Isinya antara lain pernyataan pertanggung jawaban, metode pelaksanaan, identifikasi bahaya, pengendalian risiko dan penetapan risiko pekerjaan, rancangan panduan keselamatan, biaya keselamatan dan kebutuhan personil.

c. Tahap Pengadaan.

Dalam tahap ini, RKK digunakan dalam evaluasi teknis. Berdasarkan PM 14/2020, apabila peserta tidak menyampaikan atau nilai perkiraan biaya penerapan SMKK sebesar nol rupiah, maka dinyatakan gugur.

d. Tahap Pelaksanaan.

Dalam tahap ini, RKK dibahas oleh penyedia jasa dan disetujui oleh pengguna jasa pada saat PCM. Pengendalian RKK dilaksanakan melalui persyaratan dalam pengajuan izin mulai kerja (Job Safety Analysis (JSA) / Construction Safety Analysis (CSA) dan rencana pelaksanaan pekerjaan/method statement).

- **Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)** adalah dokumen tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian Subpenyedia Jasa dan pemasok, dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.

1. Informasi Pekerjaan

- a. Data Umum Pekerjaan
- b. Lingkup Pekerjaan

2. Struktur Organisasi

- a. Pengguna Jasa
- b. Konsultan Pengawas
- c. Penyedia Jasa

3. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

4. Tahapan Pekerjaan

5. Gambar dan Spesifikasi Teknis

- a. Gambar Kerja
- b. Spesifikasi Teknis

6. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work Method Statement)

- a. Metode Kerja Pelaksanaan
- b. Tenaga Kerja
- c. Material
- d. Peralatan

- e. Aspek Keselamatan Konstruksi
- 7. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/Inspection Test Plan (ITP)
- 8. Pengendalian Subpenyedia Jasa dan Pemasok
- **Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)** merupakan dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Setiap calon Penyedia Jasa wajib menyusun dan menyampaikan RKK dalam dokumen penawaran.

RKK Penawaran terdiri dari beberapa elemen :

1. Kepemimpinan dan Partisipasi Tenaga Kerja dalam Keselamatan Konstruksi
 - a. Kepedulian Pimpinan terhadap Isu Eksternal dan Internal
 - b. Komitmen Keselamatan Konstruksi
2. Perencanaan Keselamatan Konstruksi (IBPRP serta Sasaran dan Program Khusus)
 - a. Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian dan Peluang
 - b. Rencana Tindakan (Sasaran & Program)
 - c. Standard Keselamatan Konstruksi
3. Dukungan Keselamatan Konstruksi (Jadwal Program Komunikasi)
 - a. Sumber Daya
 - b. Kompetensi
 - c. Kepedulian
 - d. Komunikasi
 - e. Informasi Terdokumentasi
4. Operasi Keselamatan Konstruksi (Analisis Keselamatan Pekerjaan/Jasa)
 - a. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
 - b. Kesiapan dan Tanggapan terhadap kondisi darurat
5. Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK (Jadwal Inspeksi dan Audit)
 - a. Pemantauan dan Evaluasi
 - b. Tinjauan Manajemen
 - c. Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

RKK Pelaksanaan terdiri dari beberapa elemen :

1. Kepemimpinan dan Partisipasi Tenaga Kerja dalam Keselamatan
 - a. Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal dan Internal
 - b. Organisasi Pengelola SMKK
 - c. Komitmen Keselamatan Konstruksi dan Partisipasi Tenaga Kerja
 - d. Supervisi, Training, Akuntabilitas, Sumber Daya dan Dukungan
2. Perencanaan Keselamatan Konstruksi
 - a. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBPRP)
 - b. Rencana Tindakan Keteknikan, Manajemen dan Tenaga Kerja yang tertuang dalam Sasaran dan Program
 - c. Pemenuhan Standard Peraturan Perundang – undangan Keselamatan Konstruksi
3. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - a. Sumber Daya berupa Teknologi, Peralatan, Material dan Biaya
 - b. Kompetensi Tenaga Kerja
 - c. Kepedulian Organisasi
 - d. Manajemen Komunikasi
 - e. Informasi Terdokumentasi
4. Operasi Keselamatan Konstruksi
 - a. Perencanaan Implementasi RKK
 - b. Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi
 - c. Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat
 - d. Investigasi Kecelakaan Konstruksi
5. Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK
 - a. Pemantauan atau Inspeksi
 - b. Audit
 - c. Evaluasi
 - d. Tinjauan Manajemen
 - e. Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

- **Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPPL)** adalah dokumen tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat rona lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang merupakan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
 1. Gambaran Umum Proyek
 - a. Data Teknis
 - b. Struktur Organisasi
 2. Rona Lingkungan awal sebelum dimulainya pekerjaan konstruksi
 3. Rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan
 4. Pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
 - a. Peta Lokasi
- **Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)** adalah dokumen tentang berisikan keselamatan lalu lintas.
 1. Pendahuluan
 - a. Informasi Umum Proyek
 - b. Peta Lokasi Proyek
 - c. Lingkup RMLLP
 2. Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan
 - a. Analisis Arus Lalu Lintas
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan

Pelapor Kegiatan.
- e. Tahap Pengawasan.

Dimana pada tahap ini, Konsultan Pengawas atau Manajemen Konstruksi wajib menyusun RKK Konsultasi, yang memuat antara lain:

 - Kepemimpinan dan partisipasi pekerjaan dalam keselamatan konstruksi
 - Perencanaan keselamatan konstruksi
 - Dukungan keselamatan konstruksi
 - Operasi keselamatan konstruksi
 - Evaluasi kinerja keselamatan konstruksi

SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permen PUPR No 10 Tahun 2021 harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:

1. Keselamatan keteknikan konstruksi
2. Keselamatan dan kesehatan kerja
3. Keselamatan publik
4. Keselamatan lingkungan

Keselamatan keteknikan konstruksi merupakan keselamatan terhadap pemenuhan standar perencanaan, perancangan, prosedur dan mutu hasil pelaksanaan, jasa konstruksi, mutu bahan, dan kelaikan peralatan. mencakup pemenuhan terhadap:

1. Standar perencanaan berupa pemenuhan semua aspek persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam hasil perencanaan
2. Standar perancangan berupa pemenuhan terhadap pedoman teknis proses pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, perawatan, dan pembongkaran yang telah ditetapkan
3. Standar prosedur dan mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi merupakan persyaratan dan ketentuan tertulis khususnya aspek Keselamatan Konstruksi yang dibakukan mengenai berbagai proses dan hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi
4. Mutu bahan sesuai Standar Nasional Indonesia dan/atau standar asing yang diakui oleh Pemerintah, dan telah ditetapkan dalam kerangka acuan kerja
5. Kelaikan peralatan berdasarkan pedoman teknis peralatan sebagai dasar pemenuhan kinerja operasi peralatan sesuai peruntukan pekerjaan, baik peralatan yang beroperasi secara tunggal maupun kombinasi.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja, penyedia jasa, subpenyedia jasa, pemasok, dan pihak lain yang diizinkan memasuki tempat kerja konstruksi yang mencakup pemenuhan terhadap:

1. Hak tenaga kerja berupa perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Penjaminan dan perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
3. Pencegahan penyebaran wabah penyakit dalam lingkungan kerja dan sekitarnya
4. Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS
5. Pencegahan penggunaan psikotropika
6. Pengamanan lingkungan kerja.

Keselamatan publik merupakan keselamatan masyarakat dan/atau pihak yang berada di lingkungan dan sekitar tempat kerja yang terdampak Pekerjaan Konstruksi yang mencakup pemenuhan terhadap :

1. Standar keselamatan publik di sekitar tempat kegiatan konstruksi
2. Upaya pencegahan kecelakaan kerja yang berdampak kepada masyarakat di sekitar tempat kegiatan konstruksi
3. Pemahaman pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja di sekitar tempat kegiatan konstruksi.

Keselamatan lingkungan merupakan keselamatan lingkungan yang terdampak oleh Pekerjaan Konstruksi sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kenyamanan lingkungan terbangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mencakup pencegahan terhadap:

1. Terganggunya derajat kesehatan pekerja dan kesehatan masyarakat di lingkungan sekitar Pekerjaan Konstruksi sebagai akibat dampak pencemaran

2. Berubahnya dampak sosial masyarakat sebagai akibat kegiatan konstruksi yang semakin padat di lingkungan Pekerjaan Konstruksi
3. Rusaknya lingkungan sebagai akibat berkembangnya situasi kepadatan kegiatan konstruksi yang menghasilkan limbah konstruksi sehingga dapat menimbulkan pencemaran terhadap air, udara, dan tanah.

Berdasarkan Permen PUPR No.10 Tahun 2021 bagian ketujuh mengenai Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, dimana SMKK diterapkan pada tahapan :

1. Pemilihan Penyedia Jasa
2. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
3. Serah terima pekerjaan

Penjabaran mengenai Penerapan SMKK pada tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai Permen PUPR No.10 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai Permen PUPR No. 10 Tahun 2021

No.	Item Penerapan	Sumber
1	Penerapan SMKK pada tahapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan melaksanakan RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP.	Pasal 24 ayat (1) Permen 10/2021
2	Pelaksanaan RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP harus disesuaikan dengan lingkup pekerjaan dan kondisi di lapangan.	Pasal 24 ayat (2) Permen 10/2021
3	RKK yang berupa RKK pelaksanaan, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP disampaikan oleh pelaksana Pekerjaan Konstruksi untuk diperiksa, dibahas, atau direviu oleh konsultan Pengawas/direksi teknis/Pengguna Jasa.	Pasal 24 ayat (3) Permen 10/2021

4	RKK yang berupa RKK pelaksanaan , RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP yang telah diperiksa, dibahas, atau direviu disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.	Pasal 24 ayat (4) Permen 10/2021
5	Program Mutu, RKK yang berupa RKK pengawasan dan RKK manajemen penyelenggaraan konstruksi disampaikan oleh konsultan Pengawas atau Konsultan Manajemen Konstruksi, diperiksa, dibahas, atau direviu oleh pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Pengguna Jasa, dan disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan Pekerjaan.	Pasal 24 ayat (5) Permen 10/2021
6	Dalam tahap pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP harus disesuaikan dengan perubahan lingkup dan kondisi pada saat pelaksanaan pekerjaan	Pasal 25 ayat (1) Permen 10/2021
7	Penyesuaian RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.	Pasal 25 ayat (2) Permen 10/2021
8	Pengguna Jasa melakukan pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL dan RMLLP, serta mengevaluasi kinerja penerapan SMKK yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa.	Pasal 25 ayat (3) Permen 10/2021

9	Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi, Pengguna Jasa dapat dibantu oleh Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi, tenaga ahli teknis yang terkait Keselamatan Konstruksi, dan/atau petugas Keselamatan Konstruksi.	Pasal 25 ayat (4) Permen 10/2021
10	Penyedia Jasa harus menerapkan AKK untuk pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko besar dan/atau sedang dan pekerjaan bersifat khusus sesuai dengan metode kerja Konstruksi yang terdapat dalam RKK.	Pasal 26 ayat (1) Permen 10/2021
11	Pekerjaan bersifat khusus paling sedikit terdiri atas pekerjaan panas, pengangkatan, ruang terbatas, menyelam, malam hari, ketinggian lebih dari 1.8, perancah, radiography, bertegangan listrik, dan penggalian atau kedalaman.	Pasal 26 ayat (2) Permen 10/2021
12	AKK disusun oleh Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, Ahli Keselamatan Konstruksi, tenaga ahli teknis yang terkait Keselamatan Konstruksi, dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi	Pasal 26 ayat (3) Permen 10/2021
13	AKK harus ditinjau kembali oleh Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, Ahli Keselamatan Konstruksi, dan/atau tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi dalam hal terjadi perubahan metode kerja, situasi, pengamanan, dan sumber daya manusia.	Pasal 26 ayat (4) Permen 10/2021

14	Hasil peninjauan kembali harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa dan ahli teknik sesuai bidangnya yang ditunjuk oleh Penyedia Jasa pelaksana konstruksi.	Pasal 26 ayat (5) Permen 10/2021
15	Dalam tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Rencana metode pelaksanaan kerja, AKK serta rencana pemeriksaan dan pengujian merupakan komponen yang digunakan sebagai bagian dari persyaratan izin kerja.	Pasal 27 Permen 10/2021
16	Penyedia Jasa pelaksana konstruksi melaporkan pelaksanaan RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP kepada Pengguna Jasa sesuai dengan kemajuan pekerjaan.	Pasal 28 ayat (1) Permen 10/2021
17	Laporan berupa laporan harian; mingguan dan akhir.	Pasal 28 ayat (2) Permen 10/2021
18	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumentasi foto dan/atau audio visual.	Pasal 28 ayat (3) Permen 10/2021
19	Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP dan laporan, Pengguna Jasa melaksanakan evaluasi kinerja penerapan SMKK setiap bulan.	Pasal 29 ayat (1) Permen 10/2021
20	Evaluasi dilakukan untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan pelaksanaan dan penerapan RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP.	Pasal 29 ayat (2) Permen 10/2021
21	Penyedia Jasa pelaksana konstruksi harus melaksanakan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja penerapan SMKK.	Pasal 29 ayat (3) Permen 10/2021

Sumber : (Permen PUPR No.10 Tahun 2021)

2.2. Perusahaan Konstruksi

Perusahaan konstruksi adalah salah satu usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan suatu perencanaan atau pelaksanaan dan pengawasan suatu kegiatan konstruksi untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain yang dalam pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan bangunan tersebut menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pengguna bangunan tersebut. Jasa pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain (Undang-undang no.18 tahun 1999). Menurut Ervianto (2002) definisi perusahaan kontraktor adalah orang atau badan usaha yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan.

Sebagai usaha yang menghasilkan produk berupa sarana prasarana fisik, perusahaan konstruksi memiliki peran vital di dalam pertumbuhan dan perkembangan nasional. Sebagai salah satu bidang industri yang masih berkembang, konstruksi akan membantu membuka lapangan kerja dan mampu mendistribusikan pendapatan untuk setiap lapisan masyarakat. Selain itu, perusahaan konstruksi juga mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan juga perkembangan nasional.

2.2.1. Karakteristik Perusahaan Konstruksi

Sebagai salah satu bidang industri, perusahaan konstruksi mempunyai beberapa ciri khas ataupun karakteristik yang sangat spesifik dan juga berbeda jauh dengan jasa industri yang lainnya. Berbagai karakteristik ini bisa ditandai dengan adanya beberapa hal di bawah ini.

- **Penuh Ketidakpastian**

Dalam bisnis konstruksi selalu dipenuhi dengan risiko yang sangat tinggi dan ketidakpastian, karena bisnis ini akan sangat berpengaruh dengan harga material, BBM, dan nilai tukar Rupiah.

- **Dipengaruhi Pembeli**
Pasar yang dimiliki oleh perusahaan konstruksi sangat dipengaruhi oleh pembeli karena kepentingan dari pembeli sangatlah dilindungi dengan adanya perusahaan asuransi, pihak pengawas, dan juga pihak lembaga keuangan bank yang mengikat perusahaan untuk terus mengikuti permintaan dari klien.
- **Budget dan Jadwal yang Fluktuatif**
Nilai kontrak dan juga harga jual yang sangat konservatif tapi tidak mempunyai biaya ataupun anggaran produksi yang sifatnya sangatlah fluktuatif. Jadwal waktu pengerjaan dan juga standar mutunya juga harus selalu ditentukan oleh pihak klien. Proses konstruksi yang cenderung berubah-ubah ini dikarenakan adanya perbedaan lokasi pembangunan dan juga perencanaan yang sesuai dengan karakteristik. Pengambilan keputusan dari pembeli akan sangat dipengaruhi dengan adanya reputasi dari perusahaan.
- **Wajib Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)**
Menerapkan Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh semua perusahaan konstruksi. Hal ini dilakukan untuk melindungi karyawan dari risiko kecelakaan ataupun risiko lainnya yang selalu mengintai di lingkungan kerja. Perusahaan juga bisa mensosialisasikan kebijakan SMKK melalui HRD. Sehingga, HRD atau Quality, Health, Safety, Environment (QHSE) pun bisa menyusun dan juga mewajibkan setiap karyawan untuk bisa mengikuti pelatihan SMKK di perusahaan.

Dalam mendirikan perusahaan konstruksi, terdapat beberapa hal yang harus selalu diperhatikan, berikut diantaranya:

- **Kualifikasi Badan Usaha**
Kualifikasi perusahaan konstruksi bisa dijadikan sebagai acuan pertama untuk para calon pebisnis perusahaan konstruksi. Aturan terkait kualifikasi ini sudah diatur di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2017 terkait usaha jasa konstruksi atau UUJK, yang terdiri dari kualifikasi usaha kecil, Kualifikasi usaha menengah, dan Kualifikasi usaha besar.

- **Izin Usaha atau Online Single Submission (OSS)**
Setiap badan usaha jasa konstruksi yang akan memberikan layanan jasa konstruksi hukumnya wajib mempunyai izin usaha, izin ini diberikan oleh pemerintah daerah setempat yang berada di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Izin usaha ini berlaku untuk bisa melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia. terkait izin usaha ini, sudah diatur berdasarkan Pasal 26 ayat 2, Pasal 28, dan Pasal 29 ayat 1 UUJK.
- **Sertifikat Badan Usaha**
Setiap perusahaan konstruksi harus mempunyai sertifikat badan usaha. Sertifikat badan usaha ini diterbitkan dengan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi kementerian. Sertifikasi dari badan usaha ini mencakup jenis usaha, sifat usaha, klasifikasi usaha, dan juga kualifikasi usaha. Agar bisa memperoleh sertifikat badan usaha, maka perusahaan konstruksi terkait harus mengajukan permohonan pada menteri dengan melalui lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha yang sebelumnya sudah terakreditasi.
- **Tanda Daftar Pengalaman**
Agar bisa memperoleh pengakuan pengalaman usaha, maka setiap badan usaha jasa konstruksi kualifikasi menengah dan besar harus bisa melakukan registrasi pengalaman pada menteri terkait. Registrasi pengalaman ini harus dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman. Minimal, tanda daftar pengalaman ini harus mencakup nama paket pekerjaan, pengguna jasa, tahun dilaksanakannya pekerjaan, nilai pekerjaan dan juga kinerja penyedia jasa. Pengalaman yang didaftarkan ke dalam tanda daftar pengalaman ini adalah pengalaman dalam menyelenggarakan jasa konstruksi yang sudah melalui proses serah

terima yang sah. Terkait tanda daftar pengalaman ini sudah diatur di dalam Pasal 31 UUK.

2.3. Kecelakaan Kerja

Kecelakaan Kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda (Permenaker No. 03/MEN/1998). Pengertian lain kecelakaan kerja adalah semua kejadian yang tidak direncanakan yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera, kesakitan, kerusakan atau kerugian lainnya (Standar AS/NZS 4801:2001).

Sedangkan definisi kecelakaan kerja menurut OHSAS 18001:2007 adalah kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera atau kesakitan (tergantung dari keparahannya) kejadian kematian atau kejadian yang dapat menyebabkan kematian.

Berikut ini beberapa pengertian kecelakaan kerja dari beberapa sumber buku:

1. Menurut Suma'mur (2009), kecelakaan kerja adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan terhadap manusia, merusak harta benda atau kerugian terhadap proses.
2. Menurut Gunawan dan Waluyo (2015), kecelakaan adalah suatu kejadian yang (tidak direncanakan) dan tidak diharapkan yang dapat mengganggu proses produksi/operasi, merusak harta benda/aset, mencederai manusia, atau merusak lingkungan.
3. Menurut Heinrich (1980), kecelakaan kerja atau kecelakaan akibat kerja adalah suatu kejadian yang tidak terencana dan tidak terkendali akibat dari suatu tindakan atau reaksi suatu objek, bahan, orang, atau radiasi yang mengakibatkan cedera atau kemungkinan akibat lainnya.
4. Menurut Reese (2009), kecelakaan kerja merupakan hasil langsung dari tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman, yang keduanya dapat dikontrol oleh manajemen. Tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman disebut sebagai penyebab langsung (immediate/primary causes)

kecelakaan karena keduanya adalah penyebab yang jelas / nyata dan secara langsung terlibat pada saat kecelakaan terjadi.

5. Menurut Tjandra (2008), kecelakaan kerja adalah suatu kecelakaan yang terjadi pada saat seseorang melakukan pekerjaan. Kecelakaan kerja merupakan peristiwa yang tidak direncanakan yang disebabkan oleh suatu tindakan yang tidak berhati-hati atau suatu keadaan yang tidak aman atau kedua-duanya.

2.3.1. Jenis – Jenis Kecelakaan Kerja

Menurut Bird dan Germain (1990), terdapat tiga jenis kecelakaan kerja, yaitu:

1. Accident, yaitu kejadian yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian baik bagi manusia maupun terhadap harta benda.
2. Incident, yaitu kejadian yang tidak diinginkan yang belum menimbulkan kerugian.
3. Near miss, yaitu kejadian hampir celaka dengan kata lain kejadian ini hampir menimbulkan kejadian incident ataupun accident. Berdasarkan lokasi dan waktu, kecelakaan kerja dibagi menjadi empat jenis yaitu (Sedarmayanti, 2011)
4. Kecelakaan kerja akibat langsung kerja.
5. Kecelakaan pada saat atau waktu kerja.
6. Kecelakaan di perjalanan (dari rumah menuju ke tempat kerja dan sebaliknya, melalui jalan wajar)
7. Penyakit akibat kerja

Berdasarkan tingkatan akibat yang ditimbulkan, kecelakaan kerja dibagi menjadi tiga jenis, yaitu (Suma'mur,1981):

1. Kecelakaan kerja ringan, yaitu kecelakaan kerja yang perlu pengobatan pada hari itu dan bisa melakukan pekerjaannya kembali atau istirahat < 2 hari. Contoh: terpeleset, tergores, terkena pecahan beling, terjatuh dan terkilir.

2. Kecelakaan kerja Sedang, yaitu kecelakaan kerja yang memerlukan pengobatan dan perlu istirahat selama > 2 hari. Contoh: terjepit, luka sampai robek, luka bakar.
3. Kecelakaan kerja berat, yaitu kecelakaan kerja yang mengalami amputasi dan kegagalan fungsi tubuh. Contoh: patah tulang

2.3.2. Penyebab Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja dapat dicegah dengan memperhatikan beberapa faktor, antara lain sebagai berikut (Suma'mur, 2009):

a. Faktor Lingkungan

Lingkungan kerja yang memenuhi persyaratan pencegahan kecelakaan kerja, yaitu:

1. Memenuhi syarat aman, meliputi higiene umum, sanitasi, ventilasi udara, pencahayaan dan penerangan di tempat kerja dan pengaturan suhu udara ruang kerja.
2. Memenuhi syarat keselamatan, meliputi kondisi gedung dan tempat kerja yang dapat menjamin keselamatan.
3. Memenuhi penyelenggaraan ketatarumahtangaan, meliputi pengaturan penyimpanan barang, penempatan dan pemasangan mesin, penggunaan tempat dan ruangan.

b. Faktor Mesin dan peralatan kerja

Mesin dan peralatan kerja harus didasarkan pada perencanaan yang baik dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Perencanaan yang baik terlihat dari baiknya pagar atau tutup pengaman pada bagian-bagian mesin atau perkakas yang bergerak, antara lain bagian yang berputar. Bila pagar atau tutup pengaman telah terpasang, harus diketahui dengan pasti efektif tidaknya pagar atau tutup pengaman tersebut yang dilihat dari bentuk dan ukurannya yang sesuai terhadap mesin atau alat serta perkakas yang terhadapnya keselamatan pekerja dilindungi.

c. Faktor Perlengkapan kerja

Alat pelindung diri merupakan perlengkapan kerja yang harus terpenuhi bagi pekerja. Alat pelindung diri berupa pakaian kerja, kacamata, sarung

tangan, yang kesemuanya harus cocok ukurannya sehingga menimbulkan kenyamanan dalam penggunaannya.

d. Faktor manusia

Pencegahan kecelakaan terhadap faktor manusia meliputi peraturan kerja, mempertimbangkan batas kemampuan dan ketrampilan pekerja, meniadakan hal-hal yang mengurangi konsentrasi kerja, menegakkan disiplin kerja, menghindari perbuatan yang mendatangkan kecelakaan serta menghilangkan adanya ketidakcocokan fisik dan mental.

Kecelakaan kerja juga dapat dikurangi, dicegah atau dihindari dengan menerapkan program yang dikenal dengan tri-E atau Triple E, yaitu (Sedarmayanti,2011):

1. Engineering (Teknik). Engineering artinya tindakan pertama adalah melengkapi semua perkakas dan mesin dengan alat pencegah kecelakaan (safety guards) misalnya tombol untuk menghentikan bekerjanya alat/mesin (cut of switches) serta alat lain, agar mereka secara teknis dapat terlindungi.
2. Education (Pendidikan). Education artinya perlu memberikan pendidikan dan latihan kepada para pegawai untuk menanamkan kebiasaan bekerja dan cara kerja yang tepat dalam rangka mencapai keadaan yang aman (safety) semaksimal mungkin.
3. Enforcement (Pelaksanaan). Enforcement artinya tindakan pelaksanaan, yang memberi jaminan bahwa peraturan pengendalian kecelakaan dilaksanakan.

2.4. Dasar Hukum Program Keselamatan Konstruksi (K2)

Peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja juga sudah diatur dalam dasar-dasar hukum konstruksi. Adapun peraturan-peraturan terkait Keselamatan dan kesehatan Kerja adalah :

1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan
5. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
6. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
7. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
8. Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
9. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
10. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 1 Tahun 1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
13. Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
15. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No : 174/MEN/1986 dan No : 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi